

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dalam segala aspek kehidupan, baik bersifat material maupun spritual. Di dalam proses pelaksanaan pembangunan menuntut keterlibatan semua pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat baik secara kelembagaan maupun perorangan. Unsur lain yang tak kalah pentingnya dalam pelaksanaan pembangunan ini, selain keterlibatan semua pihak juga peningkatan potensi sumber daya manusia, karena pada dasarnya menyiapkan sumber daya manusia berkaitan erat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, mental dan keterampilan, sehingga pada saatnya dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan, baik sebagai pelaku maupun sebagai sasaran (objek).

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999).

Menurut survei *Political and Economic Risk Consultant* (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Masih menurut survei dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.

Dari beberapa hasil survey tersebut nampak adanya ketertinggalan di dalam mutu pendidikan, baik pendidikan formal, informal, maupun nonformal dan hasil itu diperoleh setelah kita membandingkannya dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Bangsa Indonesia seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusianya yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain.

Nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal, informal maupun nonformal. Hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang.

Sejalan dengan kondisi empirik di atas, Mulyana (2008:1-2) menjelaskan disadari atau tidak, salah satu alternatif peningkatan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan, sebab kehidupan dan penghidupan yang sesuai dengan nilai-

nilai manusia baik secara individu maupun kelompok mutlak memerlukan bekal kemampuan yang dapat dibentuk melalui jalur pendidikan. Diharapkan dengan pendidikan, manusia mampu menghadapi tantangan di masa-masa yang akan datang serta menjadi manusia yang cerdas, terampil, mandiri dan bertanggung jawab (*sense of responsibility*). Pernyataan tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut hampir dapat dipastikan tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan pada program pendidikan formal semata. Ada tiga hal penting yang dapat memperjelas alasan seperti itu. Pertama; tidak semua warga negara memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengikuti pendidikan formal. Kedua; adanya keterbatasan program pendidikan formal, baik pada hakekatnya maupun peranannya untuk memikul tanggung jawab pelaksanaan fungsi dan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Ketiga; masyarakat yang terus berubah dan berkembang secara cepat sementara pendidikan formal sangat terbatas, untuk itu pencapaian tujuan pendidikan dan pelaksanaan fungsi pendidikan nasional perlu didukung oleh program pendidikan nonformal (Sudjiarto, 1992: 3).

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 menegaskan bahwa ada tiga jalur pendidikan yang dapat ditempuh masyarakat untuk meningkatkan kualitas dirinya yaitu: jalur pendidikan formal, informal dan nonformal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan pada sistem persekolahan dan jalur pendidikan informal serta nonformal merupakan pendidikan yang diselenggarakan pada sistem di luar sekolah.

Program-program pendidikan nonformal tidak hanya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan saja, akan tetapi dilaksanakan juga oleh dinas-dinas lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk pelatihan kerja. Warga masyarakat yang memperoleh layanan melalui program-program pendidikan nonformal tersebut, khususnya program pelatihan kerja, juga tidak hanya masyarakat kota, akan tetapi termasuk warga masyarakat desa, daerah terpencil, bahkan masyarakat adat.

Pelatihan kerja yang diberikan kepada masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan akan berdampak pada meningkatnya keterampilan mereka khususnya keterampilan kerja. Alhasil dengan meningkatnya keterampilan maka kemampuan melaksanakan pekerjaan akan meningkat, peningkatan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut diharapkan berdampak pada kemampuan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi lokal sebagai sumber mata pencaharian.

Coombs & Ahmed (1974: 10) menegaskan bahwa *rural people comprise the vast majority of the populations in the developing world and virtually all of them are potential clients for nonformal education whether they live on farms, in village, or in rural market town*. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa

dalam upaya memperbaiki kehidupan dan penghidupan masyarakat, pembinaan melalui jalur pendidikan nonformal merupakan alternatif terbaik dan paling tepat. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Sudjana (1993: 203-204) bahwa dalam mengembangkan masyarakat, pendidikan nonformal dapat berperan dalam tiga hal. Pertama; menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya upaya mereka untuk membebaskan diri dari kebodohan, imbalance atau upah kerja rendah, dan ketidakadilan dalam masyarakat. Kedua; membantu masyarakat untuk bisa hidup berorganisasi sehingga secara bersama dapat mempelajari keadaan kehidupannya serta menjajagi kesempatan yang berkaitan dengan pekerjaan, lapangan usaha, dan kemudahan yang dapat diperoleh seperti permodalan, bahan, alat yang dibutuhkan, dan pemasaran, serta informasi yang diperlukan. Ketiga; para pendidik dan tutor bekerja bersama dengan organisasi masyarakat dalam upaya mengidentifikasi kebutuhan dan mendayagunakan prasarana sosial, politik, dan lingkungan masyarakat untuk membantu masyarakat agar mereka mampu memecahkan masalah sosial ekonomi yang dihadapinya.

Pendidikan kewirausahaan merupakan salah satu jenis pendidikan yang tepat untuk membantu masyarakat memecahkan kesulitan ekonomi masyarakat, dan dapat dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan. Di Indonesia kewirausahaan telah menjadi mata pelajaran di beberapa sekolah dan atau lembaga pendidikan formal lainnya. Dalam Pendidikan Luar Sekolah (PLS), pendidikan kewirausahaan dapat terjadi melalui dua cara. Pertama; pendidikan kewirausahaan merupakan program tersendiri seperti pelatihan, kelompok belajar usaha, magang, kelompok pemuda produktif, kursus dan satuan belajar sejenis lainnya. Kedua;

mengintegrasikan pembelajaran kewirausahaan ke dalam kurikulum atau rencana belajar yang bertujuan: (1) agar warga belajar mampu hidup mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat dipergunakan sebagai sumber mata pencaharian, (2) memiliki bekal keterampilan untuk hidup lebih produktif, dan (3) mampu membuka usaha sendiri sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga (Sudjana, 2000: 130).

Hasil penelitian Bunyamin (dalam Sudjana, 2004: 32) tentang perintisan wirausaha atau wirausaha baru, menyimpulkan bahwa kewirausahaan dapat dipelajari antara lain melalui kegiatan pelatihan, akan tetapi keberhasilannya dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain; (1) latar belakang pendidikan peserta, (2) pengalaman kerja peserta, (3) kurikulum dan manajemen pengelolaan pelatihan.

Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa; (1) kewirausahaan itu dapat diajarkan melalui kegiatan pelatihan, (2) latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja peserta belajar dapat mempengaruhi hasil belajar, (3) percaya diri, aktif mengemukakan pendapat, tanggung jawab, dan disiplin, dapat meningkatkan keterampilan dan sikap kemitraan, (4) pelatihan keterampilan yang efektif dapat menumbuhkan kreativitas dan produktivitas berusaha.

Merujuk pada data hasil penelitian tersebut perilaku kewirausahaan sangat penting untuk dikembangkan pada diri pengrajin, khususnya pengrajin karawo di Gorontalo. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa dengan adanya perilaku kewirausahaan yang tinggi dari para pengrajin akan memberikan dampak peningkatan keterampilan dan kesejahteraan. Peningkatan perilaku dan jiwa

wirausaha pengrajin karawo dapat dilaksanakan melalui pelatihan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dengan karawo.

Di lain pihak pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo belum dapat meningkatkan perilaku kewirausahaan pengrajin karawo. Pelatihan yang dilaksanakan belum memasukkan nilai-nilai kewirausahaan, selain itu pelaksanaan pelatihan masih terbatas pada transfer ilmu, fungsi-fungsi manajemen pelatihan belum dilaksanakan dengan baik. Penyelenggara dan fasilitator hanya berusaha menyelesaikan pelatihan tanpa memperhatikan dampak penyelenggaraan pelatihan tersebut, seperti peningkatan perilaku kewirausahaan peserta pelatihan dalam mengelola usahanya.

Pada tahapan pelaksanaan pelatihan, penerapan fungsi-fungsi manajemen seperti: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan, penilaian dan pengembangan tidak dilaksanakan secara optimal. Perencanaan yang dilakukan oleh penyelenggara pelatihan mencakup rekrutmen peserta pelatihan, rekrutmen tutor, penetapan materi dan penyusunan program pembelajaran. Kegiatan pengorganisasian yang dilaksanakan adalah pembentukan penanggung jawab dan pembagian tugas. Aktifitas pada kegiatan pelaksanaan meliputi kegiatan program pelatihan baik kegiatan penyelenggara, fasilitator dan peserta. Pembinaan dilaksanakan oleh internal dan eksternal. Penilaian dilaksanakan hanya pada kegiatan pelatihan, sedangkan dampak yang diperhatikan meliputi: peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku wirausaha.

Fungsi-fungsi manajemen tersebut secara keseluruhan tidak dilaksanakan. Penyelenggara dalam merekrutmen peserta dan fasilitator hanya melihat data yang ada pada pelaksanaan pelatihan-pelatihan sebelumnya tanpa melakukan analisis terhadap kebutuhan pelatihan peserta didik dan fasilitator. Selain itu, belum adanya penetapan tata tertib bagi pelaksanaan pelatihan untuk fasilitator maupun peserta sehingga pelatihan tidak berlangsung secara efektif dan efisien. Demikian pula pada aspek-aspek lainnya. Dampak dari kurang efektifnya pelatihan yang dilaksanakan menyebabkan peserta tidak dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya dalam mengelola karawo baik pada aspek pengembangan desain maupun model karawo. Demikian pula dengan perilaku wirausaha pengrajin. Jiwa wirausahanya tidak mengalami peningkatan dan masih menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak disiplin, kerja sama yang kurang, tidak inovatif, produktivitas rendah, dan tidak berorientasi masa depan. Oleh sebab itu, perlu adanya pengembangan model pelatihan dalam usaha meningkatkan perilaku kewirausahaan pengrajin karawo dalam mengembangkan usaha. Pelatihan kewirausahaan yang diberikan kepada pengrajin karawo memiliki peluang untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil dengan menerapkan model-model pelatihan yang dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk belajar secara mandiri sehingga meningkatkan jiwa kewirausahaannya.

Model pelatihan yang dimaksudkan adalah model pelatihan yang melibatkan seluruh komponen untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif dalam mencapai tujuan belajar. Strategi pembelajaran yang digunakan pada umumnya cenderung konvensional dengan target orientasi pencapaian materi

bukan perubahan perilaku warga belajar. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan pendekatan dan model pelatihan yang bersifat pedagogis, belum memadukan pendekatan kontinum antara pedagogis dan andragogi. Kondisi ini tidak dapat menumbuhkan partisipasi warga belajar secara optimal dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan kondisi di atas maka perlu dirancang model pelatihan yang baru sebagai model pengembangan dari model-model pelatihan yang sudah ada. Pengembangan model pelatihan tersebut dibuat sesuai kebutuhan warga belajar serta potensi yang tersedia sehingga melalui pelatihan dapat ditingkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai keluarannya, serta berdampak pada peningkatan perilaku kewirausahaan serta kesejahteraan keluarga.

Pengembangan model pelatihan yang dibuat adalah pengembangan model pelatihan keterampilan dalam meningkatkan perilaku kewirausahaan. Model tersebut diasumsikan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, keterampilan dan perilaku wirausaha warga belajar sebagai *ouput*, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga sebagai *outcome* pelatihannya. Pengembangan model pelatihan tersebut diimplementasikan pada pengrajin karawo di Kabupaten Gorontalo.

B. Identifikasi Masalah

Pelatihan keterampilan bagi pengrajin karawo di Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan secara kontinu. Hal ini berkenaan dengan tujuan agar pengrajin dapat mengembangkan kerajinan tangan karawo dengan baik. Mengingat bahwa

kerajinan tangan karawo merupakan salah satu produk yang tengah dikembangkan oleh pemerintah, sebagai aset kebanggaan daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan keterampilan pengrajin karawo adalah melalui pelatihan. Namun sampai dengan tahun 2011, terdapat 35% pengrajin yang sudah dapat mengaplikasikan hasil pelatihan dengan baik, sedangkan 65% pengrajin masih tetap melaksanakan aktivitas mengarawo sebagaimana biasanya. Sementara itu, kriteria yang harus dicapai setelah pelatihan seperti pengembangan perilaku kewirausahaan belum nampak pada pengrajin. (Dinas Perindustrian Kabupaten Gorontalo: 2010)

Beberapa faktor penyebab belum meningkatnya jiwa kewirausahaan pengrajin karawo setelah mengikuti pelatihan antara lain disebabkan oleh empat alasan sebagai berikut: Pertama, program pelatihan yang dilaksanakan belum terstruktur dengan baik. Program yang dilaksanakan belum menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan, penilaian dan pengembangan tidak dilaksanakan secara optimal. Perencanaan yang dilakukan oleh penyelenggara pelatihan mencakup rekrutmen peserta pelatihan, rekrutmen tutor, penetapan materi dan penyusunan program pembelajaran. Kegiatan pengorganisasian yang dilaksanakan adalah pembentukan penanggung jawab dan pembagian tugas. Pada pelaksanaan, kegiatan yang dilaksanakan adalah program pelatihan menyangkut kegiatan penyelenggara, fasilitator dan peserta. Pembinaan dilaksanakan oleh internal dan eksternal. Penilaian dilaksanakan hanya pada kegiatan pelatihan, sedangkan dampak yang

diperhatikan meliputi: peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku wirausaha.

Kedua adalah pembinaan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelatihan atau lembaga terkait belum dilaksanakan secara optimal setelah kegiatan pelatihan berlangsung. Pengrajin karawo dalam melaksanakan aktivitas mengarawo tidak diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga perilaku kewirausahaan yang diharapkan tidak meningkat.

Ketiga adalah model pembelajaran yang diterapkan dalam pelatihan masih terbatas pada transfer ilmu kepada pengrajin, sedangkan pengembangan perilaku kewirausahaan belum dilaksanakan dan belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan pelatihan, dan alasan keempat adalah pengembangan model pelatihan belum dilaksanakan oleh penyelenggara dalam pelaksanaan setiap pelatihan.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan dan perilaku kewirausahaan pengrajin karawo di Kabupaten Gorontalo, maka dipandang urgen melakukan pengembangan pada model pelatihan keterampilan agar para peserta setelah mengikuti pelatihan berkompetisi dalam usaha karawo.

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan: Bagaimanakah model pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan perilaku kewirausahaan pengrajin karawo di Kabupaten Gorontalo.

Dalam upaya memecahkan masalah tersebut, maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi objektif pelatihan keterampilan karawo di Kabupaten Gorontalo?
2. Bagaimana model konseptual pelatihan keterampilan untuk meningkatkan perilaku kewirausahaan pengrajin karawo di Kabupaten Gorontalo?
3. Bagaimana efektivitas model pelatihan keterampilan untuk meningkatkan perilaku kewirausahaan pengrajin karawo di Kabupaten Gorontalo?
4. Bagaimana faktor-faktor pendorong dan penghambat penerapan model pelatihan keterampilan untuk meningkatkan perilaku kewirausahaan pengrajin karawo di Kabupaten Gorontalo?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan perilaku kewirausahaan pengrajin karawo di Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan tujuan umum tersebut, maka dirumuskan tujuan khusus penelitian ini yakni untuk:

1. Mendeskripsikan kondisi objektif pelatihan keterampilan karawo di Kabupaten Gorontalo.
2. Mengembangkan model konseptual pelatihan keterampilan untuk meningkatkan perilaku kewirausahaan pengrajin karawo di Kabupaten Gorontalo.
3. Mengetahui efektivitas model pelatihan keterampilan untuk meningkatkan perilaku kewirausahaan pengrajin karawo di Kabupaten Gorontalo.

4. Menemukan faktor-faktor pendorong dan penghambat penerapan model pelatihan keterampilan untuk meningkatkan perilaku kewirausahaan pengrajin karawo di Kabupaten Gorontalo.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional mutlak diperlukan agar menghindari kesalahan dalam pengtafsiran tentang penelitian ini, maka peneliti menguraikan definisi operasional yang berhubungan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Model Pelatihan

Model pelatihan disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori pengetahuan. Para ahli menyusun model pelatihan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran, teori-teori psikologis, analisis sistem, atau teori-teori yang mendukung. Mempelajari model pelatihan berdasarkan teori belajar yang dikelompokkan menjadi empat model pelatihan. Model tersebut merupakan pola yang diharapkan. Joyce & Weil (dalam Rusman, 2011: 133) mengemukakan bahwa model pelatihan adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain.

Menurut Oliva (1992:413), "*models of teaching are strategies based on theories (and often the research) of educators, psychologist, philosophers, and others who question how individual learn*". Hal ini berarti setiap model mengajar atau pembelajaran harus mengandung suatu rasional yang didasarkan pada teori, berisi serangkaian langkah strategi yang dilakukan tutor maupun siswa, didukung

dengan sistem penunjang atau fasilitas pembelajaran, dan metode untuk mengevaluasi kemajuan belajar siswa.

Suatu model pelatihan dianggap efektif manakala mampu dilandasi kurikulum, pendekatan dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan belajar sasaran didik dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengahnya. Untuk itu diperlukan persyaratan khusus dalam membangun sebuah model pelatihan yang efektif dan efisien.

Mengacu pada penjelasan di atas yang dimaksud model pelatihan dalam penelitian ini adalah suatu rancangan pembelajaran mengacu pada keterlibatan warga belajar dalam menentukan tujuan, materi, metode, dan evaluasi dalam meningkatkan keterampilan sehingga perilaku kewirausahaan warga belajar meningkat.

2. Keterampilan

Keterampilan adalah suatu keterampilan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang sekaligus merupakan produk kerajinan tangan daerah Gorontalo berupa sulaman dengan menggunakan bahan tekstil tenunan silang polos yang memiliki prospek baik untuk dikembangkan baik di tingkat nasional maupun internasional (Dikpora Gorontalo, 2010: 3).

Mengacu pada penjelasan di atas yang dimaksud dengan keterampilan dalam penelitian ini adalah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam membuat karawo dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

3. Perilaku Kewirausahaan

Perilaku adalah tindakan atau perilaku suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat di pelajari. (Notoatmojo, S 1997: 32). Perilaku manusia adalah aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respons serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. (Kasmir, 2007: 3). Lebih lanjut Jacius (1974: 112) mengatakan bahwa perilaku merupakan suatu keadaan internal (*internal state*) yang mempengaruhi pilihan tindakan individu terhadap beberapa obyek, pribadi, dan peristiwa. Berdasarkan pendapat para pakar diatas maka, penulis berkesimpulan bahwa perilaku merupakan suatu keadaan internal atau keadaan yang masih ada dalam diri manusia. Keadaan internal tersebut berupa keyakinan yang diperoleh dari proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan yang mereka dapatkan.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dipahami bahwa: (1) perilaku ditumbuhkan dan dipelajari sepanjang perkembangan orang yang bersangkutan dalam keterkaitannya dengan obyek tertentu, (2) perilaku merupakan hasil belajar manusia, sehingga perilaku dapat ditumbuhkan dan dikembangkan melalui proses belajar, (3) perilaku selalu berhubungan dengan obyek, sehingga tidak berdiri sendiri, (4) perilaku dapat berhubungan dengan satu obyek, tetapi dapat pula berhubungan dengan sederet obyek sejenis, (5) perilaku memiliki hubungan dengan aspek motivasi dan perasaan atau emosi.

Kewirausahaan adalah usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja dan hasilnya berguna bagi orang lain (Soegoto, 2009:

3). Dari pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang wirausahawan adalah individu-individu yang memanfaatkan waktu yang tersedia untuk berusaha dan menciptakan lapangan kerja, selalu berusaha melakukan inovasi-inovasi dan pembaharuan-pembaharuan terhadap bidang-bidang pekerjaan sehingga dapat mengembangkan usaha.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Alma (dalam Kamil, 2010: 123-124) menegaskan karakteristik dihubungkan dengan watak yang harus dimiliki oleh wirausaha adalah 1) percaya diri, 2) berorientasi tugas dan hasil, 3) pengambilan resiko, 4) kepemimpinan, 5) keorisinilan dan 6) berorientasi masa depan.

Merujuk pada pendapat diatas, seorang wirausahawan harus memiliki karakteristik perilaku wirausaha. Perilaku sangat dipengaruhi oleh sifat dan watak yang dimiliki oleh seseorang. Sifat dan watak yang baik, berorientasi pada kemajuan dan positif merupakan sifat dan watak yang dibutuhkan oleh seorang wirausahawan agar wirausahawan tersebut dapat maju/sukses. Perilaku yang ditunjukkan oleh individu yang memiliki perilaku kewirausahaan adalah perilaku yang menunjukkan; percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, pengambilan resiko, kepemimpinan, keorisinilan, dan berorientasi masa depan.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang dimaksud dengan perilaku kewirausahaan dalam penelitian ini adalah suatu kemampuan berpikir kreatif, dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup dengan indikator: percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, pengambilan resiko, kepemimpinan, keorisinilan, dan berorientasi masa depan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi manfaat teoretis, praktis dan kebijakan.

1. Manfaat secara teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan konseptual model pelatihan keterampilan untuk meningkatkan perilaku kewirausahaan pengrajin karawo di Kabupaten Gorontalo.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengembangan perilaku kewirausahaan dalam usaha peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan khususnya pemerintah Kabupaten Gorontalo demi mengatasi permasalahan model pengembangan pelatihan keterampilan.

3. Kebijakan

Secara *policy*, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan kerajinan karawo, terutama dalam pengembangan usaha melalui pemberian bantuan modal dan peningkatan keterampilan pengrajin karawo melalui pelatihan-pelatihan dan pendampingan teknis.

G. Kerangka Pikir Penelitian

Pelatihan keterampilan yang diselenggarakan bagi pengrajin karawo di Kabupaten Gorontalo bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku kewirausahaan sehingga dapat melakukan kegiatan usaha baru sebagai pengembangan dari hasil kerajinan tangan karawo yang mereka laksanakan dan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

Keberhasilan suatu program pelatihan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dominan, antara lain: (1) *row input*, (2) *instrumen input*, (3) proses, (4) *ouput*, dan (5) *outcome*. Faktor-faktor tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam pengelolaan pelatihan yaitu bagaimana membuat perencanaannya, pengorganisasian, pelaksanaan dan bagaimana mengevaluasinya.

Inti dari pelatihan adalah melaksanakan pembelajaran, ada beberapa komponen yang diperlukan untuk terselenggaranya pembelajaran antara lain warga belajar, tutor/pamong belajar/instruktur, sarana belajar, materi, metode pembelajaran dan waktu serta biaya. Dengan demikian maka keberhasilan pembelajaran akan dipengaruhi oleh komponen-komponen tersebut.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan berbagai upaya dalam memberdayakan pengrajin karawo dengan melaksanakan pelatihan keterampilan yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 dan tahun 2010. Akan tetapi pelatihan tersebut belum dapat meningkatkan perilaku kewirausahaan pengrajin karawo sehingga belum berdampak pada pengelolaan usaha baru yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Berdasarkan keadaan di atas, maka perlu dilakukan pelatihan baru yang dikembangkan dari pelatihan yang diberikan sebelumnya sehingga pelatihan tersebut dapat meningkatkan perilaku kewirausahaan pengrajin karawo. Peningkatan ini diharapkan dapat memotivasi pengrajin untuk menekuni usaha ini yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.

Model pelatihan yang dikembangkan tercermin dalam judul penelitian pengembangan model pelatihan keterampilan untuk meningkatkan perilaku kewirausahaan pengrajin karawo di Kabupaten Gorontalo. Perbedaan model pelatihan yang dikembangkan oleh peneliti dengan model pelatihan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo adalah: (1) mengoptimalkan keterlibatan peserta dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penilaian, (2) menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan, penilaian dan pengembangan secara optimal, (3) menjadikan peningkatan perilaku kewirausahaan peserta sebagai prioritas. Secara umum kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini terangkum dalam gambar berikut ini.



Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian

Pada gambar di atas terlihat bahwa pengembangan model pelatihan keterampilan dilakukan dengan memperhatikan kondisi objektif dan empirik, teoretik, penilaian pakar, dan keterlaksanaan model. Tujuan akhirnya adalah adanya peningkatan perilaku kewirausahaan. Perilaku kewirausahaan yang tinggi diharapkan berdampak pada pembentukan atau peningkatan usaha kerajinan karawo. Kerajinan usaha karawo yang berkembang baik diharapkan berdampak pada kesejahteraan para pengrajin.